

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang kaya perbedaan baik perbedaan suku atau etnis, agama, ras, golongan dan aliran-aliran kepercayaan serta bahasa dan kebudayaan yang terkandung dalam perbedaan tersebut (Arianto, 2012). Berdasarkan data BPSN pada tahun 2010, di Indonesia terdapat 1.340 suku bangsa, 2.500 bahasa dan 6 agama serta berbagai kepercayaan yang tersebar di Indonesia. Pluralisme agama adalah suatu sistem nilai yang memandang keberagaman atau kemajemukan agama secara positif sekaligus optimis dengan menerimanya sebagai kenyataan (Sunnatullah) dan berupaya berbuat sebaik mungkin berdasarkan kenyataan (Hambali, Yon dan Sintang, 2014: 101). Pluralisme tersebar dari Sabang hingga Marauke dan menjadi ciri khas masing-masing daerah, ciri khas tersebut secara alamiah membentuk keindahan dan daya tarik yang dikenal ditingkat lokal oleh daerah-daerah lainnya di Indonesia hingga ke tingkat internasional.

Pluralisme membuat kondisi masyarakat heterogen dan bervariasi, mulai dari kondisi sosial, ekonomi, psikologi dan budaya. Hal tersebut yang mempengaruhi perilaku ataupun tingkahlaku politik masyarakat pada momen politik nantinya, sebab hal-hal yang melatarbelakangi akan berimplikasi pada bangunan pengetahuan dan preferensinya kemudian (Mahdalena, 2012: 7).

Mahdalena juga berpendapat bahwa pluralisme sering dimanfaatkan oleh sebagian orang yang memiliki kepentingan politik. Kepentingan politik secara otomatis membentuk kelompok-kelompok yang dapat menimbulkan gesekan dan berpotensi besar terjadinya konflik vertikal maupun horizontal melalui pengalihan isu atau isu-isu yang sengaja diciptakan untuk kepentingan politik, dan berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan suatu daerah dan stabilitas politik lokal hingga nasional.

Menurut Jumadi dan Yakoop (2013), menjelang pesta demokrasi (pemilihan umum), memobilisasi massa untuk memperoleh dukungan besar biasa terjadi dengan berbagai cara, salah satunya melalui golongan atau etnis pribumi yang ada pada suatu daerah karena pulihnya hak-hak politik rakyat sebagai wujud dari sistem politik saat ini yang semakin demokratis yang didukung dengan kebebasan pers serta diberlakukannya otonomi yang luas kepada pemerintah daerah. Aktor-aktor lokal yang terorganisir dalam institusi adat dan partai politik menjadi salah satu kekuatan baru dalam dinamika politik lokal. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang memberikan kekuasaan dan kewenangan politik yang begitu besar kepada masyarakat di daerah, pada realitanya juga memunculkan sebuah fenomena politik identitas yang berasaskan etnis dan agama (Jumadi dan Yakoop, 2013: 18).

Kekuasaan dan kewenangan elit politik lokal tak diimbangi dengan hak masyarakat untuk mendapatkan pendidikan, baik pendidikan secara akademik maupun secara khusus mengenai pendidikan politik oleh partai politik. Tingkat pendidikan masyarakat menjadi salah satu faktor yang dapat dimanfaatkan oleh

elit politik di daerah untuk meraih kekuasaan dengan menambahkan aroma-aroma etnis dan atau agama tertentu yang ada di suatu daerah (Taum, 2006). Ketika dua pihak baik individu maupun lembaga memiliki hubungan yang erat dan menyatu, maka akan ada dua kemungkinan yang terjadi. Yang pertama adalah harmonisasi hubungan, yang kedua adalah kemungkinan terjadinya singgungan hubungan dalam bentuk konflik atau perselisihan (Nurjaman dkk, 2006: 127).

Simmel (dalam Soekanto, 2002) menyatakan bahwa konflik terjadi dalam pola hubungan dyad, yaitu adanya dua pihak yang berinteraksi secara rasional maupun emosional atau dapat pula terjadi dalam triad, ketika ada dua pihak yang berkonflik dengan pihak ketiga sebagai penengah konflik. Salah satu perubahan yang paling dramatis adalah pergeseran dari konflik antar negara yang tradisional (perang antara negara-negara berdaulat) menuju ke konflik dalam negara (konflik yang terjadi antara faksi-faksi dalam sebuah negara) (Nurjaman dkk, 2006: 127-128). Berarti situasi politik di dalam negeri harus lebih diperhatikan karena politik lokal yang semakin menguat karena aktor-aktor lokal di daerah memiliki basis massa yang dapat mereka manfaatkan untuk kepentingan politik dengan topeng kesamaan suku, agama, ras ataupun golongan yang disulut dengan keadaan sosial dan ekonomi yang semakin digembar-gemborkan.

Menurut Buchari (2014), seiring mencuatnya fenomena politik yang memanfaatkan masyarakat sebagai kekuatan berpolitik, seringkali diciptakan isu-isu identitas yang mengarah pada istilah konflik etnis. Konflik etnis memiliki cakupan elemen yang luas seperti ras, kultur, agama, keturunan, sejarah, bahasa dan lain sebagainya. Dari elemen-elemen tersebut dapat dimanfaatkan oleh elit-

elit politik dan menjadi identitas fundamental yang kemudian membentuk kelompok-kelompok, dari kelompok inilah diciptakan pola pikir kelompok seperti rasa memiliki, memilih, menjaga serta melindungi identitas.

Geertz (1963) menyatakan bahwa studi tentang politik identitas akan terus mendapat perhatian, terutama yang berkaitan dengan identitas keetnisan, gender, masyarakat pribumi (*indigenous community*) dan masyarakat lokal (*local communities*). Menurut Geertz, politik identitas bukan topik pembicaraan baru bagi kalangan para ahli ilmu-ilmu sosial. Dalam kajian politik Indonesia, riset mengenai politik identitas etnis ini diprakarsai oleh seorang ilmuwan Amerika, yaitu Kahin pada tahun 1952 yang kemudian dilanjutkan oleh ilmuwan-ilmuwan lainnya, seperti Smail pada tahun 1970, Liddle pada tahun 1970, McVey pada tahun 1972, Harvey pada tahun 1981 dan Magenda pada tahun 1991. Kajian serupa juga banyak dilakukan oleh para ahli dari berbagai universitas di Indonesia seperti Asmu'ie pada tahun 2006 tentang Kalimantan Barat, Nas tentang Sulawesi Selatan dan Maunati pada tahun 2004 tentang Kalimantan Timur (Buchari, 2012: 1). Adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah, banyak dimanfaatkan oleh berbagai daerah untuk menjadi dasar hukum dan landasan otonomi daerah dengan tujuan mewujudkan demokratisasi.

Keberagaman di Indonesia diibaratkan sebuah taman yang ditumbuhi tanaman yang warna-warni, apabila keberagaman itu tidak dikelola dengan baik konflik akan mudah terjadi (Taum, 2006). Berkaitan dengan penelitian ini,

Lindayanti dan Witrianto (2014) menyatakan bahwa keberagaman atau multi etnis di Indonesia memiliki dampak positif maupun negatif. Contoh positifnya adalah bertambahnya solidaritas dalam grup (merasa senasib-sepenanggungan atau adanya perkawinan antar etnis), perubahan kepribadian para individu (sadar akan kekurangan dirinya), dapat menyelesaikan suatu masalah dengan perundingan atau musyawarah dan sebagainya. Sedangkan contoh negatifnya adalah goyah dan retaknya persatuan kelompok, kesenjangan kemakmuran, sentimen perbedaan pendirian baik agama, budaya ataupun kepentingan, menguatnya primordialisme dan etnosentrisme yang memicu terjadinya konflik dan menimbulkan hancurnya harta-benda, jatuhnya korban nyawa maupun timbulnya rasa cemas dan trauma.

Indonesia mencatat sejarah konflik nasional Pasca Orde Baru, yang melibatkan suku, agama atau etnisitas seperti yang terjadi di Kalimantan Barat pada tahun 1996-1997 dan 1999, Kalimantan Tengah pada tahun 2001, Ambon pada tahun 1999, Maluku Utara pada tahun 2000 dan Poso pada tahun 2001 (Marzali, 2003). Dalam perspektif politik, muncul anggapan bahwa terjadinya konflik itu akibat permainan elit politik sebagai upaya untuk men-delegitimasi pemerintahan pasca tumbanganya rezim Orde Baru (Humaidy, 2007). Kecenderungan negara yang hegemonik, refresif dan berbagai macam amputasi kepada rakyat, maka pada kondisi dan saat tertentu rakyat akan jenuh dan membangkitkan perlawanan melalui dua cara, yaitu melakukan perlawanan terhadap pemerintah (penguasa) melalui gerakan sparatis atau melakukan tindakan hukum yang tidak prosedural serta melanggar norma-norma hukum negara karena

perangkat hukum yang ada tidak lagi mendapat legitimasi dari masyarakat (Bake, Abas dan Rinusu, dalam Humaidy, 2007).

Pada tahun 2001, konflik di Kalimantan Tengah merupakan salah satu contoh konflik identitas ditingkat lokal, yaitu masyarakat pendatang Suku Madura dengan penduduk lokal asli yaitu Suku Dayak (Nurhasim, 2005). Menurut beberapa LSM/NGO (dalam Humaidy, 2007) pada tanggal 01 Maret 2001 di Jakarta, konflik yang terjadi tidak dapat disederhanakan sebagai konflik antara orang Dayak dan Madura, apalagi sebagai konflik agama. Akar konflik sudah lama tercipta ketika pemerintahan Orde Baru yang didukung oleh lembaga-lembaga hutang internasional secara bersama-sama menanam modal pada proyek-proyek besar, yang juga menanam akar dari konflik yang terjadi saat itu dan menggambarkan kondisi kemanusiaan di Indonesia secara umum.

Contoh lain, sengketa Pemilu Pilkada Tahun 2010 di Kabupaten Kotawaringin Barat (Metrotvnews.com, 2015), karut-marut pilkada ini semakin meluas ketika massa terpecah menjadi dua pendukung masing-masing calon. Konflik ini terjadi dalam satu etnis karena dua calon yang diusung dalam pemilihan umum tersebut sama-sama dari Etnis Dayak. Gesekan semakin keras sehingga terjadi konflik yang menjurus pada kekerasan, berdampak pada pola destruktif baik terhadap lingkungan fisik sarana prasarana, manusia maupun alam.

Politik identitas menjadi predikat yang melekat dalam membahas pandangan politik etnis baik secara individu maupun kolektif (Haboddin, 2012). Selain itu politik identitas menjadi hal yang menarik untuk dikaji, karena dalam proses politik yang memanfaatkan etnis dan atau agama untuk meraih tujuan atau

kekuasaan politik, seringkali dilanda konflik sosial yang disebabkan oleh faktor sosial yang ada dalam masyarakat dan jumlah keterwakilan politik pada etnis dan agama, serta tuntutan kesejahteraan yang dipastikan akan muncul saat menyusun strategi politik. Pasca Orde Lama sistem politik di Indonesia semakin semerbak beraroma agama dan kedaerahan (etnisitas). Tuntutan yang mengharuskan “putera daerah” menjadi kepala daerah muncul, ditingkat lokal asas legitimasi dalam struktur politik didasari dengan politik identitas (Jumadi dan Yakoop, 2013: 18).

Etnis Mendawai yang berinduk pada Suku Dayak Ngaju, merupakan populasi etnis terbanyak di banding etnis lainnya yang ada di Pangkalan Bun, yaitu 41,24% dari jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat (Sensus Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah, 2010). Etnis Mendawai adalah etnis asli dan tertua yang mendiami Pangkalan Bun. Menurut Alloy dan Kern (dalam Buchari, 2014: 119), nenek moyang Etnis Dayak berasal dari campuran bangsa Kaukasus di Eropa Timur dengan Bangsa Mongolia yang mengembara sampai ke Pulau Kalimantan melalui sungai.

Etnis Mendawai memiliki bahasa, sistem sosial dan kearifan lokal yang menjadi daya tarik (Sulaiman, 2008). Hal tersebut yang membentuk pola pikir masyarakat Etnis Mendawai, baik untuk menjaga kelangsungan atau bertahan hidup, menjaga tradisi dari derasnya modernisasi yang masuk dan juga pola pikir atau cara mereka memandang politik di era demokrasi, globalisasi dan modernisasi saat ini. Perbedaan tersebut yang menjadi hal penting bagi penulis untuk diteliti, karena dapat dimanfaatkan oleh elit lokal untuk kepentingan politik

dan berpotensi besar terjadi konflik baik internal (sesama etnis) atau eksternal (dengan etnis lainnya).

Terdapat sepuluh suku asli yang mendiami wilayah Kotawaringin Barat dan berinduk pada Suku Dayak Ngaju, yaitu Suku Mendawai, Suku Ruku Mapaan, Suku Darat, Suku Lamandau, Suku Bulik, Suku Mentobi, Suku Belantikan, Suku Batang Kana, Suku Kawak dan Suku Delang Ulu / Ilir (Lontaan dan Sanusi, dalam Sulaiman, 2008). Sepuluh suku asli tersebut merujuk pada komposisi Etnis Dayak sebesar 41,42%. Sedangkan komposisi etnis pendatang adalah Etnis Banjar 24,20%, Jawa 18,06%, Madura 3,46%, Sunda 1,36% dan etnis lainnya 11,50% (Tionghoa, Arab, Batak, Bugis, Bali, Flores, NTT dan lain-lain) (Sensus Penduduk 2010 Provinsi Kalimantan Tengah). Selain itu, komposisi agama atau kepercayaan yang ada di Kotawaringin Barat adalah Islam 92,29%, Protestan 4,28%, Katholik 1,60%, Hindu 0,42%, Budha 0,32, Khonghucu 0,03% dan lainnya 1,06% (termasuk Kaharingan) (Kotawaringin Barat Dalam Angka, 2014).

Minimnya kesadaran terhadap pluralisme menjadi pemicu konflik, masalah seperti ini dapat dimanfaatkan oleh elit politik. Kotawaringin Barat merupakan salah satu daerah yang memiliki keberagaman tersebut, yang pada akhirnya menimbulkan pragmentasi politik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sudut pandang politik suatu kelompok masyarakat (etnis), riset ini dianggap penting karena etnisitas banyak dijadikan sebagai instrumen atau kepentingan politik.

Multikulturalisme merupakan pola pikir yang menuntut kesediaan untuk menerima kehadiran kelompok dan sistem nilai lain dalam kehidupan bersama tanpa memperdulikan perbedaan budaya, stratifikasi sosial, gender dan agama (Buchari, 2014). Buchari juga menyatakan bahwa faktor heterogenitas merupakan suatu komponen yang perlu diperhatikan yang didalamnya terdapat faktor geografis, demografis, sosial masyarakat dan juga kondisi masyarakat secara kategorial. Hal ini merupakan kajian yang menarik bagi penulis untuk menjadikan Pangkalan Bun serta masyarakat Etnis Mendawai sebagai lokasi dan objek penelitian. Studi ini membahas tentang asumsi masyarakat terhadap politik oleh masyarakat Etnis Mendawai di Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana persepsi politik masyarakat Mendawai terhadap arti politik, partisipasi politik, politik lokal, pendidikan politik dan manfaat politik di Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah?

C. Tujuan Dan Manfaat

C.1.1 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sudut pandang suatu kelompok masyarakat (etnis) terhadap politik dan untuk mengetahui tingkat

pengetahuan politik suatu golongan atau masyarakat Mendawai di Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah.

C.1.2 Manfaat

C.1.2.1 Manfaat Teoritis

C.1.2.1.1 Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah keilmuan di bidang kajian politik lokal khususnya mengenai persepsi politik etnis baik secara umum bagi dunia pendidikan maupun secara khusus bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

C.1.2.1.2 Diharapkan juga dapat diperoleh konsep baru bagi pengembangan ilmu, khususnya ilmu sosial dan ilmu politik.

C.1.2.2 Manfaat Praktis

C.1.2.2.1 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan dan pertimbangan dalam memahami dan merumuskan kebijakan politik lokal khususnya terhadap politik etnis.

C.1.2.2.2 Diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi terciptanya kewaspadaan pemerintah terutama di Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga politik identitas etnis tidak menjurus kepada etnosentrisme.

C.1.2.2.3 Meminimalisir terjadinya kebangkitan etnis yang sering dipergunakan oleh etnis tertentu atau elit politik untuk membuat tuntutan-tuntutan demi kepentingan etnis atau golongan tertentu di Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah secara khusus, dan Indonesia pada umumnya.

D. Sistematika Skripsi

Laporan hasil penelitian ini akan terdiri dari empat (4) bab yang meliputi pendahuluan, deskripsi objek penelitian, pembahasan dan penutup. Bab I menjelaskan mengenai latar belakang masalah yang melatarbelakangi pengangkatan topik ini sebagai skripsi dengan penjelasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika skripsi, kerangka teori dan metode penelitian. Bab II memaparkan tentang deskripsi wilayah dan objek penelitian, yakni wilayah Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah dan masyarakat Mendawai yang ada di Pangkalan Bun.

Selanjutnya, bab III menguraikan analisa terhadap hasil penelitian tentang Persepsi Politik Etnis Mendawai di Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah. Dan yang terakhir, bab IV merupakan bab penutup berisi kesimpulan mengenai Persepsi Politik Etnis Mendawai di Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah dan rekomendasi sebagai bahan masukan dan solusi yang diberikan penulis dari hasil penelitian.

E. Kerangka Teori

E.1.1 Pengertian Persepsi, Politik dan Etnis

E.1.1.1 Persepsi

Persepsi dalam arti sempit adalah penglihatan atau cara seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas persepsi adalah pandangan atau pengertian, yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu (Leavit, dalam Putri, 2014). Menurut Wittig (dalam Putri, 2014) persepsi adalah proses menginterpretasikan stimulus oleh seseorang (*perception is the process by which a person interprets sensory stimuli*), persepsi muncul dari beberapa bagian pengalaman sebelumnya. Sedangkan menurut William James (dalam Putri, 2014), persepsi terbentuk atas dasar kata-kata yang diperoleh di lingkungan yang diserap oleh panca indera serta sebagian lainnya diperoleh dari ingatan kita dan kemudian diolah kembali berdasarkan pengalaman yang kita peroleh.

Menurut Putri (2014), Lingkungan berpengaruh besar terhadap rangsangan yang ditangkap manusia melalui inderanya, sampai akhirnya timbul makna spontan yang akan ditampilkan dalam perilaku, dengan demikian perilaku individu tidak terlepas dari persepsinya. Persepsi seseorang terhadap suatu objek akan dipengaruhi sejauh mana pemahamannya terhadap objek persepsi yang belum jelas atau belum dikenal sama sekali tidak akan mungkin memberikan makna. Persepsi akan timbul setelah seseorang atau sekelompok manusia terlebih dahulu merasakan kehadiran suatu objek dan setelah dirasakan akan menginterpretasikan objek yang dirasakan tersebut, seperti yang dinyatakan Kimball (dalam Putri, 2014), persepsi merupakan suatu yang menunjukkan aktivitas merasakan, menginterpretasikan dan memahami objek fisik maupun sosial.

Menurut Siagian (dalam Putri, 2014) secara umum ada tiga faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, yaitu:

- 1) Diri orang yang bersangkutan. Apabila seseorang melihat sesuatu dan berusaha memberikan interpretasi tentang apa yang dilihatnya itu, ia dipengaruhi oleh karakteristik individu yang turut mempengaruhi seperti sikap, motif, kepentingan, minat, pengalaman dan harapan.
- 2) Sasaran terhadap persepsi. Sasaran yang digunakan dalam persepsi bisa berupa orang, benda atau peristiwa. Sifat-sifat sasaran biasanya berpengaruh terhadap persepsi orang yang dilihatnya. Ciri-ciri lain dari sasaran persepsi itu turut menentukan cara pandang orang dalam melihatnya.

- 3) Situasi. Persepsi harus dilihat secara kontekstual yang berarti dalam situasi mana persepsi itu timbul perlu pula mendapat perhatian. Situasi merupakan fakta yang turut berperan dalam pertumbuhan persepsi seseorang.

Sejalan dengan yang dikemukakan Kasali (dalam Putri, 2014), faktor-faktor lain yang juga menentukan persepsi, yaitu:

- 1) Latar belakang budaya.
- 2) Pengalaman masa lalu
- 3) Nilai-nilai yang dianut
- 4) Berita-berita yang berkembang

Menurut Rukminto (dalam Putri, 2014) ada beberapa hal penting dalam membicarakan persepsi, yaitu:

- 1) *Impression Formation*, proses di mana informasi tentang orang lain diubah menjadi pengetahuan atau pemikiran yang relatif menyerap orang tersebut. Hal ini terbentuk melalui pengkategorian berdasarkan teori kepribadian yang implisit, mempertimbangkan atau mengkombinasikan segi positif serta negatif dan praduga.
- 2) *Attribution*, karena manusia tidak mempunyai akses untuk mengetahui pikiran, motif ataupun perasaan orang lain, kita dapat meningkatkan kemampuan kita untuk menduga perilaku yang akan dilakukan orang tertentu pada saat yang lain.
- 3) *Social Relationship*, kehadiran orang lain mempengaruhi tingkah laku yang dapat terbentuk karena imitasi (peniruan), konformitas (serupa

dengan imitasi namun ada sanksi apabila tidak ditiru) dan kepatuhan (banyak diterapkan dalam dunia militer).

- 4) Perhatian, merupakan perumusan atau konsentrasi dan seluruh aktifitas ditentukan kepada sesuatu atau sekelompok objek.

Faktor-faktor lain yang berpengaruh pada persepsi adalah faktor internal (perasaan, pengalaman, kemampuan berfikir, motivasi dan kerangka acuan) dan eksternal (stimulus dan keadaan lingkungan di mana persepsi itu berlangsung). Kejelasan stimulus akan banyak berpengaruh pada persepsi. Apabila stimulus berwujud benda-benda bukan manusia, maka ketepatan persepsi lebih terletak pada individu yang mengadakan persepsi karena benda-benda yang di persepsi tersebut tidak ada usaha untuk mempengaruhi yang mempersepsi (Jalaludin, dalam Putri, 2014).

Salah satu teori yang dianggap penulis relevan dengan penelitian ini adalah teori persepsi menurut Kasali, yang dikemukakan oleh Putri (2014) karena dalam teori tersebut menyebutkan beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang. Salah satunya ialah latar belakang budaya yang erat kaitannya dengan pluralitas yang diangkat dalam penelitian ini.

E.1.1.2 Politik

Politik merupakan serapan dari bahasa Yunani yaitu politikos yang memiliki arti dari, untuk atau yang berkaitan dengan warga negara (Partanto dan Barry, 2001). Dijelaskan pula secara etimologi, politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Menurut

Partanto dan Barry (2001), politik adalah sebuah ilmu pengetahuan, urusan dan tindakan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (sistem atau dasar pemerintahan), pemerintah negara terhadap negara lain untuk menangani atau menghadapi suatu masalah dengan bijaksana.

Dijelaskan pula derivatif kata politik antara lain berpolitik, memolitikkan, memperpolitikkan dan pemolitikkan. Politik adalah ilmu kenegaraan atau tata negara sebagai kata kolektif yang menunjukkan pemikiran yang bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan (Partanto dan Barry, 2001: 608). Dalam Bahasa Arab politik juga disebut *siyasyah* yang kemudian diterjemahkan menjadi siasat atau yang dikenal dengan sebutan *politics*.

Politik dapat pula diartikan cerdas dan bijaksana yang dalam pembicaraan sehari-hari diungkapkan sebagai cara yang dipakai untuk mewujudkan tujuan (Syafiie, 2012). Menurut Syafiie, pada dasarnya politik mempunyai ruang lingkup negara, karena teori politik menyelidiki negara sebagai lembaga politik yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Selain itu politik juga menyelidiki ide-ide, azas-azas, sejarah pembentukan negara, hakekat negara serta bentuk dan tujuannya, disamping itu politik juga menyelidiki hal-hal seperti kelompok elit, kelompok kepentingan, kelompok penekan, pendapat umum, peranan partai politik dan keberadaan pemilihan umum.

Menurut Syafiie (2012), asal mula kata politik berasal dari kata polis yang berarti negara kota dan berkaitan dengan hubungan khusus antara manusia yang hidup bersama serta menimbulkan aturan, kewenangan, perilaku pejabat, legalitas kekuasaan hingga pada akhirnya menjadi kekuasaan. Politik juga dapat dikatakan

sebagai kebijaksanaan, kekuatan, kekuasaan pemerintah, pengaturan konflik yang menjadi konsensus nasional serta kemudian kekuatan massa rakyat. Politik juga disebut seni dan suatu disiplin ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Politik pun dapat dikatakan sebagai ilmu karena merupakan pengetahuan yang memiliki obyek, subyek, metodologi, sistem, terminologi, ciri, teori yang khas dan spesifik serta diterima secara universal diseluruh dunia, disamping dapat diajarkan dan dipelajari oleh orang banyak (Syafiie, 2012: 57-58).

Dalam pengertian umum politik adalah segala debat, konflik, keputusan dan kerjasama di antara orang, kelompok atau organisasi dalam soal kontrol, alokasi dan penggunaan sumberdaya ekonomi, nilai dan ide (Triono, 2004: 238-239). Sedikit berbeda dengan pendapat Leftwich (dalam Triono, 2004), politik mencakup semua aktivitas kerjasama dan konflik, di dalam dan antara masyarakat, di mana orang melakukan pengorganisasian penggunaan, produksi, distribusi, reproduksi, kehidupan sosial dan biologisnya.

Dalam kaitannya dengan praktek kebijakan, Altman (dalam Triono, 2004) berpendapat bahwa politik selalu berkaitan dengan soal keterlibatan dalam debat mengenai kepentingan personal, kolektif dan tentang penentuan program serta kebijakan. Banfield (dalam Triono, 2004) mengemukakan pendapatnya, yaitu politik juga diartikan sebagai penggunaan pengaruh di mana terdapat konflik kepentingan yang coba menentukan proses di mana sumberdaya diperoleh dan dialokasikan. Strategi pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat yang mandiri, otonom, mampu dan berdaya mengatasi krisis merupakan sesuatu yang sangat tepat dan diperlukan saat ini.

Proses pemberdayaan selalu melibatkan tindakan politik, bagaimana kekuasaan diperoleh akan selalu disertai dengan tindakan politik menyangkut bagaimana sumberdaya sosial-ekonomi, politik, budaya, diperoleh dan dialokasikan. Hal itu akan selalu disertai dengan konflik-konflik kepentingan dan konsensus yang menyertainya untuk sampai pada keputusan kolektif tertentu (Triono, 2004: 238-239). Menurut Soltau (dalam Syafiie, 2012: 58) politik untuk selanjutnya akan dianggap pelajaran tentang negara, maksud dan tujuan negara, lembaga yang melaksanakan tujuan tersebut, hubungan antara negara dengan warganegaranya, serta hubungan antar negara dan juga apa yang dipikirkan warganya, keluhan ditulis dalam berbagai pertanyaan.

Politik diartikan juga sebagai usaha pembahasan yang teratur untuk menemukan pencegahan kebingungan yang kacau dalam pengertian yang lebih luas dan lebih umum hubungannya (Dahl dalam Syafiie, 2012: 58). Bluntschli (dalam Syafiie, 2012: 58) menyatakan bahwa politik adalah ilmu yang memperhatikan masalah kenegaraan, yaitu yang berusaha keras untuk mengerti dalam paham kondisi situasi negara, yang bersifat penting dalam berbagai bentuk manifestasi pembangunan. Lebih lanjut, Gettel (dalam Syafiie, 2012: 58) mengatakan politik adalah ilmu yang membahas negara, hal tersebut berlaku baik antar seseorang dengan orang lain yang paling ujung sekalipun disentuh hukum, hubungan antar perorangan, ataupun kelompok orang-orang dengan negaranya serta hubungan negara dengan negara.

Apabila politik dipandang sebagai ilmu dengan alasan memiliki obyek, subyek, metodologi, sistem, terminologi, ciri, teori serta dapat diajarkan maupun

dipelajari, maka sebuah lembaga internasional yang dikenal dengan sebutan UNESCO membagi ilmu tersebut menjadi beberapa bidang. Bidang-bidang tersebut antara lain (Syafiie, 2012):

- 1) Bidang teori politik yang mencakup tentang Teori Politik dan Sejarah Perkembangan Ide Politik.
- 2) Bidang Lembaga Politik yang mencakup tentang Undang-Undang Dasar, Pemerintahan Negara, Pemerintahan Daerah, Administrasi negara dan Perbandingan Lembaga Politik.
- 3) Bidang Kepartaian, Golongan dan Pendapat Umum yang mencakup tentang Partai Politik, Kelompok Penekan dan Partisipasi Warganegara dalam Pemerintahan.
- 4) Bidang Hubungan Internasional yang mencakup bidang Politik Internasional, Organisasi Internasional dan Hukum Internasional.

Seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), perkembangan ruang lingkup ilmu politik semakin meluas ke seluruh aspek-aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Terjadi tumpang-tindih antara ilmu politik dengan ilmu-ilmu lainnya terutama ilmu-ilmu kenegaraan seperti pemerintahan, administrasi publik, tata negara dan sebagainya, maka ilmu politik kembali dijabarkan ke dalam beberapa bidang. Bidang-bidang tersebut antara lain (Syafiie, 2012: 61-62):

- 1) Bidang Kebijakan Pemerintah meliputi Pengambilan Keputusan Pemerintah, Sistem Pendelegasian Wewenang dan Hubungan Pusat dan Daerah.
- 2) Bidang Ekonomi Politik meliputi Politik Perdagangan Dunia, Globalisasi Ekonomi dan Kutub-Kutub Ekonomi yang Berpengaruh.
- 3) Bidang Sosial Politik meliputi Pengkajian Keberadaan Kelompok Kepentingan dan Penekan dan Telaah Budaya Politik.
- 4) Bidang Psikologi Politik meliputi Teori Penguasaan Massa, Teori-Teori Demokrasi, Normalisasi Kehidupan Masyarakat, Politik Manajemen Konflik dan Politik Manajemen Kolaborasi.
- 5) Bidang Filsafat Politik meliputi Etika Politik, Logika Politik, Estetika Politik, Sekularisme Politik, Politik Agama, Retorika Politik dan Politik Islam.
- 6) Bidang Pelayanan Publik meliputi Administrasi Pemerintahan Daerah dan Pusat, Teori-Teori Organisasi dan Manajemen Pemerintahan.
- 7) Bidang Aturan Politik meliputi Perubahan dan Pembentukan Konstitusi, Legitimasi Kekusasan, Peraturan-Peraturan Daerah dan Pusat, Disintegrasi dan Bubarnya Negara, serta Penjajahan dan Penggabungan Negara.

Menurut Budiardjo (2008: 13), ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik (*politics*) atau kepolitikan, politik adalah usaha menggapai kehidupan yang

baik. Politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu perlu ditentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan umum (*public policies*) yang menyangkut pengaturan dan pembagian (*distribution*) atau alokasi (*allocation*) dari sumber-sumber dan *resources* yang ada.

Untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan itu, perlu dimiliki kekuasaan (*power*) dan kewenangan (*authority*), yang akan dipakai baik untuk membina kerjasama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses dengan cara yang bersifat persuasi (meyakinkan) dan paksaan (*coercion*) (Budiardjo, 1972: 8). Menurut Laswell dan Kaplan (dalam Budiardjo, 2008), ilmu politik mempelajari pembentukan dan pembagian kekuasaan. Noer (dalam Budiardjo, 2008) menyebutkan, ilmu politik memusatkan perhatian pada masalah kekuasaan dalam kehidupan bersama atau bermasyarakat. Fletchheim (dalam Budiardjo, 2008) juga mendefinisikan ilmu politik sebagai ilmu sosial yang khusus mempelajari sifat dan tujuan dari negara sejauh negara merupakan organisasi kekuasaan, beserta sifat dan tujuan dari gejala-gejala kekuasaan lain yang tidak resmi yang dapat memengaruhi negara. Ditekankan bahwa kekuasaan politik dan tujuan politik saling memengaruhi dan bergantung satu sama lain.

Kekuasaan adalah salah satu hal yang krusial dan tidak lepas dari istilah-istilah politik yang telah didefinisikan sebelumnya. Secara umum dikatakan politik adalah kekuasaan. Budiardjo (1972) mengungkapkan definisi kekuasaan, yaitu kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk memengaruhi

tingkah-lakunya seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah-laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang memunyai kekuasaan.

Di antara banyak bentuk kekuasaan ini ada suatu bentuk yang penting yaitu kekuasaan politik. Kekuasaan politik adalah kemampuan untuk memengaruhi kebijaksanaan umum (pemerintah) baik terbentuknya maupun akibat-akibatnya sesuai dengan tujuan-tujuan pemegang kekuasaan sendiri (Budiardjo, 1972). Menurut Wirawan (2003), salah satu tenaga penggerak perubahan peradaban umat manusia adalah kekuasaan atau *social power*.

Connolly dan Lukes (dalam Budiardjo, 2008) menganggap kekuasaan sebagai suatu konsep yang dipertentangkan. Kekuasaan juga didefinisikan oleh Laswell dan Abraham (dalam Budiardjo, 2008), yaitu suatu hubungan di mana seseorang atau sekelompok orang dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain ke arah tujuan dari pihak pertama. Serupa dengan yang dirumuskan oleh Doodwin (2003), kekuasaan adalah kemampuan untuk mengakibatkan seseorang bertindak dengan cara yang oleh yang bersangkutan tidak akan dipilih, seandainya ia tidak dilibatkan.

Beragam definisi politik menurut para ahli di atas, penulis menarik kesimpulan yang relevan dengan penelitian ini. Politik adalah sebuah ilmu yang mempelajari sistem dalam kehidupan untuk kehidupan yang lebih baik (Budiardjo, 2008). Dari definisi tersebut, Budiardjo juga mengatakan bahwa

terdapat kekuasaan didalamnya, yaitu perilaku manusia untuk memengaruhi orang lain.

E.1.1.3 Etnis

Kata etnis berasal dari bahasa Yunani, yaitu *ethnos* yang berarti “penyembahan” atau “pemuja berhala” (Ardiansyah, 2004). Menurut Ardiansyah, di Inggris terminologi ini digunakan mulai pertengahan abad XIV yang dalam perjalanannya mengalami reduksi ke arah penyebutan karakter ras. Sedangkan di Amerika Serikat, terminologi tersebut digunakan secara masif pada saat Perang Dunia I sebagai penghalus penyebutan bangsa-bangsa yang dianggap inferior, seperti Yahudi, Italia dan Irish.

Etnis biasanya dikaitkan dengan isu minoritas dan hubungan kekuasaan. Hal tersebut berkembang dengan kecenderungan membicarakannya dalam konteks sebuah unit sub-nasional (Ardiansyah, 2004: 264-265). Etnis adalah sesuatu yang bersifat kesukuan atau bersifat etnik (Partanto dan Barry, 2001: 162). Menurut Haboddin (2012), etnis merupakan konsep relasional yang berhubungan dengan identifikasi diri dan askrpsi sosial. Identitas etnis sulit diubah karena pemahaman ini dibangun di atas pemahaman persamaan darah (kelahiran), warna kulit dan kepercayaan yang menyangkut suku, ras, nasionalitas dan kasta.

Etnis diartikan bertalian dengan kelompok sosial, sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan tertentu karena keturunan, adat,

agama, bahasa dan sebagainya (Partanto dan Barry, 2015). Menurut Horowitz (dalam Ardiansyah, 2004) terminologi etnis berkaitan erat dengan kelahiran dan darah, walaupun tidak selalu demikian. “Keaslian” individu sangat diperhitungkan, tetapi tidak menutup adanya perkecualian. Identitas etnis relatif sulit untuk diubah, walaupun bisa saja terjadi. Oleh karenanya, identitas etnis adalah berdasarkan persamaan darah (kelahiran) bagi sebagian besar anggotanya.

Dalam konteks sosiologis, etnis adalah sesuatu yang ditentukan atau *ascribed status*. Namun demikian, beberapa variasi tetap dapat dihadirkan karena etnis juga mengacu pada kesamaan kepercayaan. Dengan memperhitungkan adanya disparitas antara ciri-ciri fisik dan konsepsi kelompok maka pengertian etnisitas menjadi elastis (Horowitz dalam Ardiansyah, 2004).

Sebuah kelompok etnis dibedakan berdasarkan warna kulit, bahasa dan kepercayaan (*religion*), yang mencakup suku, ras, nasionalitas dan kasta. Menurut Ensiklopedi Indonesia, etnis adalah kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan tertentu karena keturunan, adat, agama, bahasa dan sebagainya. Anggota-anggota suatu kelompok etnik memiliki kesamaan dalam hal sejarah (keturunan), bahasa (baik yang digunakan ataupun tidak), sistem nilai, serta adat-istiadat dan tradisi. Shadily (2012) juga mendefinisikan, etnis adalah segolongan rakyat yang masih dianggap mempunyai hubungan biologis. Sedangkan menurut Barth (2012), etnis adalah himpunan manusia karena kesamaan ras, agama, asal-usul bangsa ataupun kombinasi dari kategori tersebut yang terikat pada sistem nilai budaya.

Dari definisi-definisi tentang etnis di atas, identitas merupakan hal yang melekat pada setiap orang, kelompok atau golongan berdasarkan kaitan-kaitan tertentu seperti keturunan, agama dan sebagainya. Identitas adalah keidentikan untuk membuktikan keberadaan atas diri atau pengenalan diri, dalam hal ini adalah bersifat individu maupun kelompok sebuah etnis agar dianggap keberadaannya (Partanto dan Barry, 2001). Kelompok identitas cenderung untuk menuntut penentuan nasib sendiri atau menuntut hak-hak mereka untuk diperlakukan sama dengan semua warga negara, tepat pada saat negara tidak memenuhi tujuan yang mereka inginkan.

Menurut Margill (1996) dari sudut pandang etnis yang eksis pada suatu negara menimbulkan suatu gerakan, yaitu etno-nasionalisme. Konsensus gerakan etno-nasionalisme secara fundamental terletak pada masalah politik dan emosional daripada ekonomi serta dipandang pula gerakan yang melibatkan massa. Mardiansyah (2004) mendefinisikan etno-nasionalisme ialah paham kebangsaan dengan sentimen etnis (agama, suku, ras) sebagai basisnya. Apa yang tadinya bernama etnisitas ataupun semangat etnosentrisme ingin diwujudkan ke dalam suatu entitas politik yang bernama negara bangsa (*nation state*).

Multikulturalisme juga merupakan sebuah faham yang berkaitan dengan penjabaran atau pendefinisian dari kata etnis. Menurut Kymlicka (dalam Setyaningrum, 2004: 293-294) secara politis multikulturalisme merupakan kebijakan terhadap perlindungan keberagaman latar belakang identitas kolektif (etnis, agama ataupun ras) didalam suatu negara-bangsa. Sedangkan dalam dimensi kebudayaan, multikulturalisme merupakan konstruksi sosial terhadap

kesadaran untuk melihat keragaman identitas kolektif didalam relasi sosial yang bersifat *incompatible* atau tidak setara dalam masing-masing identitas kolektif suatu kelompok yang sangat potensial memicu terjadinya konflik sosial (Haggis dan Schech dalam Setyaningrum, 2004: 294).

Buchari (2014: 31) juga mendefinisikan multikulturalisme, yaitu pola pikir yang menuntut kesediaan untuk menerima kehadiran kelompok dan sistem nilai lain dalam kehidupan bersama tanpa memperdulikan perbedaan budaya, stratifikasi sosial, jender dan agama. Sejalan dengan pernyataan Suparlan (dalam Buchari, 2014: 32), bahwa multikulturalisme sebagai ideologis yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dan kesederajatan manusia baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat sekaligus dengan kebudayaannya. Berbeda dengan pendapat Watson (dalam Buchari, 2014: 32), multikulturalisme ialah sebagai prinsip yang menghendaki semua kita harus menerima perbedaan, terbuka terhadap perubahan, menghendaki kesetaraan, mampu mengenali diri kita yang sesungguhnya dalam hubungan dengan “keasingan” orang lain, prinsip ini harus menjadi pijakan dalam mengambil setiap tindakan.

Sistem politik yang ideal adalah sistem politik yang menyediakan kesempatan yang sama dan rata untuk mengekspresikan sebuah identitas dan aspirasi bagi setiap kelompok budaya. Berkaitan dengan hal ini perlu adanya sebuah kebijakan spesifik untuk mengakomodasi perbedaan-perbedaan kelompok atau etnis. Berikut tiga hal spesifik mengakomodasi perbedaan-perbedaan kelompok atau etnis (Buchari, 2014: 33):

- 1) Hak Atas Pemerintahan Sendiri.
- 2) Hak Polietnis, berupa langkah-langkah positif untuk menghapus diskriminasi dan prasangka.
- 3) Hak Perwakilan Khusus.

Di sisi lain pembahasan etnisitas juga berkaitan dengan faham keberagaman atau yang dikenal dengan sebutan pluralisme. Menurut Nasikun (2004: 332-333) ada empat elemen yang terkandung dalam pluralisme, yaitu:

- 1) Otonomi Fungsional
- 2) Desentralisasi
- 3) Hirarki
- 4) Tradisi

Selain itu juga ada empat hal yang harus mendapat perhatian serta penanganan serius agar pluralisme, lokalisme dan komunitas kembali terbangun. Empat hal tersebut adalah:

- 1) Penemuan kembali lokalisme
- 2) Kebangkitan kembali lokalisme.
- 3) Pembangunan kembali politik.
- 4) Kelahiran kembali sistem kekerabatan yang nyaris mati digantikan oleh meluasnya materialisme dan individualisme.

Penulis menarik kesimpulan yang relevan dari beberapa teori etnis di atas, yaitu konsep relasional yang berhubungan dengan identifikasi diri dan askripsi sosial (Haboddin, 2012). Karena dalam penelitian ini mengkaji politik dari sudut pandang masyarakat yang mengidentifikasikan dirinya sebagai masyarakat etnis.

E.1.2 Politik Identitas

Secara teoritis politik identitas merupakan sesuatu yang bersifat hidup atau ada dalam setiap etnis, di mana keberadaannya bersifat laten dan potensial, dan sewaktu-waktu dapat muncul ke permukaan sebagai kekuatan politik yang dominan. Secara empiris, politik identitas merupakan aktualisasi partisipasi politik yang terkonstruksi dari akar budaya masyarakat setempat, dan mengalami proses internalisasi secara terus-menerus didalam kebudayaan masyarakatnya dalam suatu jalinan interaksi sosial (Buchari, 2014: 19). Menurut Castells (dalam Buchari, 2014: 19) politik identitas merupakan partisipasi individual pada kehidupan sosial yang lebih ditentukan oleh budaya dan psikologis seseorang. Sedangkan menurut Hill (dalam Buchari, 2014: 19-20) politik identitas mengacu kepada praktik dan nilai politik yang berdasarkan berbagai identitas politik dan sosial.

Dalam prosesnya mencapai suatu tujuan, politik identitas menjadi sebuah alat untuk perjuangan politik. Ketidakadilan politik yang dirasakan oleh suatu kelompok etnis menjadi sebuah tekanan dan merupakan faktor penyebab terjadinya sebuah gesekan yang dapat dimanfaatkan oleh elit politik sebagai penunjang untuk meraih kekuasaan di panggung politik. Kristianus (dalam

Buchari, 2014: 20) mengemukakan bahwa politik identitas berkaitan dengan perebutan kekuasaan politik berdasarkan identitas etnis maupun agama.

Identitas kelompok merupakan suatu penunjang konstruksi sosial untuk mempromosikan keterwakilan kepentingan kelompok (Brown dalam Buchari, 2014: 21). Suparlan (dalam Buchari, 2014: 22) menyebutkan identitas merupakan suatu jati diri yang berarti pengenalan atau pengakuan terhadap seseorang sebagai termasuk dalam sesuatu golongan yang dilakukan berdasarkan atas serangkaian ciri-cirinya yang merupakan satu-satuan yang bulat dan menyeluruh, yang menandainya sebagai termasuk dalam golongan tersebut. Untuk mengonstruksi pembangunan identitas serta mengetahui siapa yang berperan dan apa kegunaannya, Castells (dalam Buchari, 2014: 23) membentuk tiga landasan untuk pembangunan identitas, yaitu:

- 1) *Legitimizing Identity* atau Identitas Legitimasi, yaitu identitas yang diperkenalkan oleh sebuah institusi yang mendominasi suatu masyarakat untuk merasionalisasikan dan melanjutkan dominasinya terhadap aktor-aktor sosial.
- 2) *Resistance Identity* atau Identitas Resiten, yaitu sebuah proses pembentukan identitas oleh aktor-aktor sosial yang dalam kondisi tertekan dengan adanya dominasi dan stereotipe oleh pihak-pihak lain sehingga membentuk resistensi dan pemunculan identitas yang berbeda dari pihak yang mendominasi, dengan tujuan untuk keberlangsungan hidup kelompok atau golongannya.

- 3) *Project Identity* atau Identitas Proyek, yaitu suatu identitas di mana aktor-aktor sosial membentuk suatu identitas baru yang dapat menentukan posisi-posisi baru dalam masyarakat sekaligus mentransformasi struktur masyarakat secara keseluruhan.

Heyes (dalam Buchari, 2014: 27) mendefinisikan politik identitas sebagai penandaan aktivitas politis dalam pengertian yang lebih luas dan terisolasi terhadap ditemukannya pengalaman-pengalaman ketidakadilan yang dialami bersama anggota-anggota dari kelompok-kelompok sosial tertentu. Berdasarkan teoritis etnik *versi* Marx, Sjaf (2014) merumuskan beberapa asumsinya mengenai relitas politik etnis, yaitu:

- 1) Realitas sosial merupakan realitas yang dibangun dari basis ekonomi, ketimbang basis etnisitas.
- 2) Realitas etnik dapat sebagai penghalang kemajuan sosial, apabila etnisitas tidak berhasil membangun etnografi bagi mereka sendiri dan sebaliknya.
- 3) Realitas keberadaan etnisitas dapat dijadikan sebagai instrumen kaum borjuasi untuk melanggengkan kepentingan kekuasaannya.

Berbeda dengan Weber dengan perspektif konstruktivismenya yang memandang etnis sebagai identitas kelompok atas dasar kepercayaan yang sama dari segi kultur dan bahasa yang bersifat subyektif. Weber juga merumuskan empat prinsip utama terkait etnisitas, yaitu (Sinisa dalam Sjaf, 2014: 18):

- 1) Etnisitas sebagai bentuk dari status kelompok.
- 2) Etnisitas sebagai mekanisme dari terpaan monopolistik sosial.
- 3) Keragaman bentuk etnik dari organisasi sosial.
- 4) Etnisitas dan mobilisasi politik.

Politik identitas dalam literatur politik dibedakan secara tajam antara identitas politik (*political identity*) dengan politik identitas (*political of identity*) (Haboddin, 2012: 119). *Political identity* merupakan konstruksi yang menentukan posisi kepentingan subjek didalam ikatan suatu komunitas politik, sedangkan *political of identity* mengacu pada mekanisme politik pengorganisasian identitas. Chandakirana (dalam Haboddin, 2012: 120) menyatakan politik identitas biasanya digunakan oleh para pemimpin sebagai retorika politik dengan sebutan kami bagi “orang asli” yang menghendaki kekuasaan dan mereka bagi “orang pendatang” yang harus melepaskan kekuasaan. Secara singkat, politik identitas sekedar untuk dijadikan alat memanipulasi dan alat untuk menggalang politik untuk memenuhi kepentingan ekonomi dan politik.

E.1.3 Melacak Politik Etnisitas di Indonesia

Haboddin (2012) menjelaskan, apabila bangunan berpikir Nordhot pada penelitiannya tahun 2007 diikuti maka dapat dipastikan kesimpulannya adalah politik identitas merupakan bentukan dari Negara Orde Baru, begitu pula dengan Larasati yang mengatakan bahwa negara sangat berperan dalam pembentukan

politik identitas. Menurut Henk (dalam Haboddin, 2012), ada empat kebijakan yang dijalankan Orde Baru untuk melemahkan politik etnisitas di tanah air, yaitu:

- 1) Tidak ada daerah yang asli, maksudnya adalah semua daerah terbuka sebagai daerah migrasi maupun transmigrasi.
- 2) Pemerintah Orde Baru menghindari terbentuknya kelas, merupakan sebab ketatnya kontrol terhadap SARA dan yang boleh menggunakan hanya pemerintah untuk menjustifikasi kelompok yang bersalah.
- 3) Modernisasi dijalankan supaya pengaruh etnis dan agama merosot.
- 4) Negara yang mengatur supaya tidak ada yang tumpang tindih antara agama dan suku, dengan cara ini persatuan tidak pernah ada dan pemerintah pusat tidak terancam.

Pada Era Orde Baru masyarakat lebih baik memilih menutup diri dari budaya maupun pilihan politik. Pada tahun 1995 sampai runtuhnya Rezim Orde Baru, konflik etnis mulai bermunculan di daerah-daerah. Pye (dalam Haboddin, 2012) menuturkan, guncangan politik karena ledakan politik etnisitas sudah kita rasakan pengaruhnya seperti yang terjadi pada pertikaian Dayak-Madura, peristiwa kekerasan Mei 1998 di Jakarta dan pengusiran etnis Buton-Bugis dan Makassar di Ambon. Realitas empiris dari gerakan politik etnisitas menemukan relevansinya di beberapa daerah, misalnya politik identitas yang mengandalkan mobilisasi massa dengan tujuan akhir adalah perampasan kekuasaan muncul

dalam mengiringi politik desentralisasi dengan lahirnya konsepsi putra daerah (Haboddin, 2012).

Pada tahun 2013, Jumadi dan Yakoop melakukan penelitian di Kalimantan Barat tentang etnisitas sebagai instrumen politik dan keamanan. Kajian tersebut dilatarbelakangi oleh aktor-aktor lokal yang terorganisir dalam insitusi adat dan partai politik menjadi kekuatan baru dalam dinamika politik lokal. Pulihnya hak-hak politik rakyat, adanya pemilihan umum yang demokratis, revitalisasi peran dan fungsi lembaga legislatif, kebebasan pers dan diberlakukannya otonomi seluas-luasnya kepada pemerintah daerah merupakan perwujudan dari berakhirnya Rezim Orde Baru di sistem politik Indonesia atau yang lebih dikenal dengan demokrasi.

Jenis penelitian yang dilakukan oleh Jumadi dan Yakoop merujuk pada pendapat Babbie dan Benaquisto (2010) yang termasuk dalam kajian *eksploratory*, yaitu penelitian yang dilaksanakan untuk mendapatkan data dan informasi tentang sesuatu yang relatif baru, ditujukan untuk kepentingan pendalaman lanjutan. Penelitian tersebut tidak hanya menggunakan kajian literatur tetapi juga menekankan pada penelitian lapangan. Selain itu, juga menggunakan analisis yang sifatnya bertema (*thematic*) mengacu kepada masalah yang bersifat spesifik, yaitu etnisitas, keterwakilan politik dan keamanan komunitas.

Data penelitian yang digunakan Jumadi dan Yakoop adalah primer (wawancara mendalam dan terbuka dengan informan) dan sekunder (buku, artikel

dan dokumen terkait). Kaidah yang dipakai untuk menentukan informan dalam penelitiannya adalah secara *purposive*, yaitu dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan dari penelitian. Sedangkan untuk mendapatkan validitas datanya menggunakan teknik triangulasi, yaitu membandingkan hasil wawancara, pengamatan dan dokumen yang diperoleh.

Pada tahun 2012, Haboddin melakukan penelitian tentang menguatnya politik identitas di ranah lokal. Kajian tersebut dilatarbelakangi oleh gerakan politik identitas yang semakin jelas pada dinamika politik lokal setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Haboddin menggunakan studi pustaka sebagai analisisnya serta mengangkat isu-isu politik identitas yang terjadi di Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Irian Jaya sebagai objek penelitiannya.

Hasil dan analisis penelitian yang dilakukan oleh Haboddin ini terbagi dalam tiga bagian, yaitu:

- 1) Praktek Politik Etnisitas Era Orde Baru, mencakup tentang dominasi pendatang dalam birokrasi di Papua.
- 2) Reformasi dan Menguatnya Politik Etnisitas, mencakup tentang isu putra daerah di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Riau serta isu penguasaan sumber daya ekonomi.
- 3) Menata Politik Identitas.

Pada tahun 2013, Jumadi dan Yakoop juga melakukan penelitian yang mengkaji tentang keterwakilan politik etnis Dayak dan Melayu dalam kepemimpinan di Kalimantan Barat pasca Rezim Orde Baru. Kajian tersebut dilatarbelakangi oleh semakin panasnya dinamika politik lokal yang berimplikasi pada munculnya aktor, institusi dan budaya lokal yang mulai memainkan peran pada perpolitikan daerah. Aktor-aktor lokal yang terorganisir dalam institusi adat dan partai politik dianggap menjadi salah satu kekuatan baru dalam dinamika politik lokal.

Jumadi dan Yakoop menggunakan metode kajian literatur serta penekanan pada penelitian lapangan. Selain itu juga menggunakan pendekatan kualitatif, serta sumber data primer (wawancara mendalam) dan sekunder (buku, jurnal dan surat kabar). Selain itu, mengacu pada kerangka konseptual Lijphart (1984) tentang *consociational democracy*, Gurr (1994) tentang *ethnopolitic* dan pendekatan instrumentalism. Jumadi dan Yakoop juga mengidentifikasi faktor-faktor penting yang mempengaruhi munculnya politik identitas di Kalimantan Barat, seperti faktor struktural, keadaan politik, ketidakberimbangan perwakilan politik dan stereotip etnik.

Mahdalena juga melakukan penelitian tentang faktor budaya dan etnisitas sebagai bentuk pengkategorian yang berpengaruh pada perilaku memilih. Penelitian Mahdalena dilakukan pada tahun 2012 dan etnis Tionghoa di Kota Medan khususnya di Kelurahan Pusat Pasar sebagai objek penelitian, karena menurut Mahdalena ada banyak faktor yang mengindikasikan pilihan-pilihan politik atau tingkah laku politiknya.

Mahdalena menggunakan analisis kualitatif yang bersifat deskriptif-kualitatif dengan teknik penelitian lapangan sebagai teknik pengumpulan datanya. Dalam pemilihan umum, masyarakat Etnis Tionghoa menjatuhkan pilihan politiknya berdasarkan informasi yang mereka terima, yang mana pilihan tersebut berkorelasi dengan etnisitas. Dari penelitian Mahdalena ini ditemukan beberapa alasan masyarakat Etnis Tionghoa dalam memilih pada Pemilu 2010, yaitu:

- 1) Mereka menganggap hak pilih adalah sebagian dari hak asasi.
- 2) Ikut dalam pemilihan umum merupakan kewajiban bagi warga negara.
- 3) Hak pilih warga negara sebagai sarana pelaksanaan demokrasi dalam pemilihan umum.
- 4) Ikut serta dalam menentukan pemimpin mereka lewat pemilihan umum.

Perbedaan dari empat penelitian terdahulu di atas dengan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian. Fokus dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih dalam persepsi masyarakat Etnis Mendawai yang ada di Pangkalan Bun terhadap politik saat ini, khususnya politik lokal yang ada di daerah tersebut. Sedangkan persamaannya terletak pada jenis data yang digunakan Jumadi dan Yakoop yaitu, primer (wawancara mendalam dan terbuka dengan informan) dan sekunder (buku, artikel dan dokumen terkait).

F. Kerangka Pemikiran Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat sebuah variabel, yaitu politik etnis (identitas). Variabel politik etnis (identitas) ini merujuk pada kajian empiris yang dilakukan oleh Buchari (2014). Menurutnya, politik etnis (identitas) merupakan aktualisasi partisipasi politik yang terkonstruksi dari akar budaya masyarakat setempat, dan mengalami proses internalisasi secara terus-menerus di dalam kebudayaan masyarakat dalam suatu jalinan interaksi sosial.

Kajian empiris ini diarahkan sebagai landasan berfikir untuk mengatasi persoalan-persoalan klasik yang muncul pada masyarakat etnis. Dari kajian empiris tersebut, peneliti akan mengkaji persepsi politik dari kacamata masyarakat etnis. Dalam kajian empiris ini pula akan mengidentifikasi sejauh mana tingkat pengetahuan masyarakat etnis terhadap dinamika politik lokal di daerah.

G. Definisi Konseptual

Fokus dalam penelitian ini ialah konsep persepsi politik etnis pada domein perilaku masyarakat terhadap politik saat ini, sehingga definisi konseptual penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Persepsi merupakan pandangan seseorang atau sekelompok orang dalam menanggapi informasi yang diterimanya berdasarkan pengalaman, pengetahuan, konsep dan lingkungan.

- 2) Politik adalah ilmu yang mempelajari kekuasaan dan kewenangan mengenai debat, konflik, keputusan (kebijakan) dan kerjasama, atau kontrol dan manajemen terhadap hal tersebut dengan cerdas dan bijaksana agar terwujudnya tujuan atau kepentingan.
- 3) Etnis adalah sesuatu yang ditentukan (*ascribed status*) dengan konsep relasional yang berhubungan dengan identifikasi diri dan askrpsi sosial berdasarkan perbedaan suku, kepercayaan, ras, bahasa, nasionalitas ataupun kasta yang menjadi karakter serta melekat pada setiap orang.
- 4) Politik Identitas adalah interaksi sosial masyarakat yang tinggal di sebuah tempat dengan pola pikir kultur (tradisional) kedaerahan untuk melihat atau memperhatikan politik sebagai bentuk partisipasi yang akan menjadi sebuah kekuatan politik.

H. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam menganalisis data maka perlu diberikan batasan-batasan dan gejala-gejala yang diidentifikasi dengan tujuan untuk menjawab masalah penelitian. Variabel persepsi politik etnis merujuk pada sebuah kajian empiris tentang politik identitas. Buchari (2014) menjelaskan bahwa politik etnis (identitas) merupakan aktualisasi partisipasi politik yang terkonstruksi dari akar budaya masyarakat setempat dan mengalami proses internalisasi secara terus-menerus didalam kebudayaan masyarakat dalam suatu jalinan interaksi sosial.

Dari penjelasan tersebut, penulis hanya akan mengkaji asumsi atau opini masyarakat terhadap politik saat ini yang diidentifikasi dari aspek identitas etnis (kultur) masyarakat Mendawai di Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk membuat definisi operasional penulis merujuk sebuah teori persepsi yang dikemukakan Kasali (dalam Putri, 2014), yaitu:

H. 1. 1 Latar Belakang Budaya

H. 1. 1. 1 Persepsi masyarakat etnis terhadap politik dan partisipasi politik

H. 1. 2 Pengalaman Masa Lalu

H. 1. 2. 1 Persepsi masyarakat etnis terhadap dinamika politik lokal

H. 1. 3 Nilai-nilai yang Dianut

H. 1. 3. 1 Pandangan masyarakat etnis terhadap pendidikan politik

H. 1. 4 Berita-berita yang Berkembang

H. 1. 4. 1 Pandangan dan penilaian masyarakat etnis terhadap manfaat politik

I. Metode Penelitian

I.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan model fenomenologi. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati secara holistik pada latar dan individu (Bogdan dan Taylor dalam Moleong, 1997: 3). Sejalan dengan Kirk dan Miller (dalam Moleong, 1997: 3), penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental tergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.

Menurut Creswell (2010), penelitian kualitatif adalah proses penelitian ilmiah yang lebih dimaksudkan untuk memahami masalah-masalah manusia dalam konteks sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan, melaporkan pandangan terperinci dari narasumber, serta dilakukan dalam *setting* yang alamiah tanpa adanya intervensi apapun dari peneliti. Dan menurut Banister (dalam Herdiansyah, 2010: 8), penelitian kualitatif adalah metode untuk menangkap dan memberikan gambaran terhadap suatu fenomena, mengekspresikan fenomena dan menjelaskan fenomena yang diteliti. Penelitian kualitatif ditujukan untuk mendapatkan pemahaman yang mendasar, melalui pengalaman *first-hand* dari peneliti yang langsung berproses dan melebur menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan subjek dan latar yang akan diteliti

berupa laporan yang sebenar-benarnya, apa adanya dan catatan-catatan lapangan yang aktual serta memahami bagaimana para subjek penelitian mengambil makna dari lingkungan sekitar dan bagaimana makna-makna tersebut mempengaruhi perilaku subjek sendiri (Denzin dan Lincoln dalam Herdiansyah, 2010: 7).

Penelitian kualitatif memiliki beberapa unsur, yaitu data penelitian berasal dari berbagai macam sumber seperti wawancara dan pengamatan, terdiri dari berbagai prosedur analisis dan interpretasi yang digunakan untuk mendapatkan temuan atau teori dan laporan tertulis serta lisan yang wajib dikembangkan oleh peneliti (Anselm Strauss dan Juliet Corbin, 2003: 7). Penelitian kualitatif juga memiliki karakteristik, yaitu (Moleong: 1997: 4-8):

- 1) Latar Alamiah, ialah melakukan penelitian pada latar alamiah atau pada konteks dari suatu keutuhan (entity).
- 2) Manusia Sebagai Alat (instrumen), ialah peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama.
- 3) Menggunakan Metode Kualitatif.
- 4) Menggunakan Analisis Data Secara Induktif.
- 5) Teori dari Dasar, ialah lebih menghendaki arah bimbingan penyusunan teori substantif yang berasal dari data.
- 6) Deskriptif, ialah mengumpulkan data berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka.

- 7) Lebih Mementingkan Proses daripada Hasil.
- 8) Adanya “Batas” yang Ditentukan oleh “Fokus”.
- 9) Adanya Kriteria Khusus untuk Keabsahan Data.
- 10) Desain yang Bersifat Sementara.
- 11) Hasil Penelitian Dirundingkan dan Disepakati Bersama.

Fenomeologi berasal dari bahasa latin, yaitu *phi-nomena* dan *logos*. *Phi-nomena* berarti realita sosial yang berdasarkan atas pemahaman dan keyakinan dari subjek yang bersangkutan. Sedangkan *logos* berarti ilmu atau pengetahuan (Herdiansyah, 2015). Herdiansyah juga menerangkan bahwa fenomenologi berkaitan dan mempengaruhi sudut pandang, sikap, persepsi dan bahkan perilaku orang atau sekelompok orang yang memaknainya. Fenomenologi adalah suatu studi untuk memberikan gambaran tentang suatu arti dari pengalaman-pengalaman beberapa individu mengenai suatu konsep tertentu (Polkinghorne, dalam Herdiansyah, 2015).

Menurut Herdiansyah (2015), fenomenologi berusaha untuk mencari arti secara psikologis dari suatu pengalaman individu terhadap suatu fenomena melalui penelitian yang mendalam dalam konteks kehidupan sehari-hari subjek yang diteliti. Dalam melakukan studi fenomenologi terdapat beberapa unsur, yaitu (Creswell, 2010):

- 1) peneliti harus memahami perspektif dan filosofis yang ada di belakang pendekatan yang digunakan, khususnya mengenai konsep studi “bagaimana individu mengalami suatu fenomena yang terjadi”.
- 2) Peneliti membuat pertanyaan penelitian yang mengeksplorasi serta menggali arti dari pengalaman subjek dan meminta subjek untuk menjelaskan pengalamannya tersebut.
- 3) Peneliti mencari, menggali dan mengumpulkan data dari subjek yang terlibat secara langsung dengan fenomena yang terjadi.
- 4) Setelah data terkumpul, peneliti mulai melakukan analisis data yang terdiri atas tahapan-tahapan analisis.
- 5) Laporan penelitian diakhiri dengan diperolehnya pemahaman yang lebih esensial, dan sangat struktur yang invarian dari suatu pengalaman individu, mengenali setiap unit terkecil dari arti yang diperoleh berdasarkan pengalaman individu tersebut.

I.1.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di wilayah hukum Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu masyarakat Mendawai yang ada di wilayah tersebut. Alasan pemilihan lokasi tersebut karena faktor heterogenitas merupakan suatu komponen yang perlu diperhatikan, yang didalamnya terdapat faktor geografis, demografis, sosial masyarakat dan juga

kondisi masyarakat secara kategorial. Pangkalan Bun merupakan salah satu daerah yang memiliki keberagaman tersebut.

Sedangkan masyarakat Mendawai ialah karena memiliki bahasa, sistem sosial dan kearifan lokal yang menjadi daya tarik. Kemajemukan yang ada di Pangkalan Bun memungkinkan terjadinya gesekan antara masyarakat sesama Mendawai maupun masyarakat Mendawai dengan non-Mendawai. Gesekan-gesekan inilah yang kemudian dapat dimanfaatkan oleh elit politik, seperti fenomena-fenomena konflik yang pernah terjadi di Pangkalan Bun.

I.1.3 Unit Analisa Penelitian

Unit analisa dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Unit Analisa Penelitian

No.	Objek Analisa	Jumlah Informan Kunci
1	Tokoh Masyarakat	3
2	Masyarakat	5
Total		8

Berkenaan dengan tujuan penelitian ini, yang terpenting ialah bagaimana menentukan informan kunci (*key information*) atau situasi sosial tertentu yang sarat informasi sesuai dengan fokus penelitian. Menurut Bungin (2003), untuk menentukan informan kunci lebih tepat dilakukan secara sengaja (*purposive sampling*). Menentukan banyaknya informan kunci dalam penelitian kualitatif lebih fleksibel disesuaikan dengan situasi kondisi dan kebutuhan dari penelitian itu sendiri (Herdiansyah, 2015). Dengan menggunakan pertimbangan pribadi yang

sesuai dengan topik penelitian, peneliti memilih subjek / objek sebagai unit analisis (Satori dan Komariah, 2012). Satori dan Komariah juga mengatakan, dalam memilih unit analisis peneliti memilih berdasarkan kebutuhannya dan menganggap bahwa unit analisis tersebut representatif.

Menurut Herdiansyah (2015), jumlah subjek dalam penelitian kualitatif tidak terlalu “berkepentingan”, yang lebih penting adalah kedalaman dan keterikatan antara subjek penelitian dengan fenomena yang diteliti. Dengan demikian, jumlah sampel tergantung dari tepat-tidaknya pemilihan informan kunci dan kompleksitas serta keragaman fenomena sosial yang diteliti. Untuk memilih sampel (dalam hal informan kunci) lebih tepat dilakukan secara sengaja.

Strategi yang relevan dan digunakan dalam penelitian ini adalah perpaduan strategi pengambilan Sampel yang Sejenis dengan Sampel Bola Salju atau Berantai. Karena dalam strategi Sampel yang Sejenis menggambarkan suatu kelompok tertentu secara mendalam, serta dengan wawancara terbuka mengenai isu yang terfokus pada kelompok dengan sampel lima (5) hingga delapan (8) orang. Selain itu dapat mengajak orang lain yang berlatarbelakang sama untuk berpartisipasi dalam wawancara tentang isu-isu yang mempengaruhi. Sedangkan strategi Bola Salju atau Berantai menempatkan informasi yang kaya dari informan kunci, dengan menanyai sejumlah orang yang bisa berbicara, maka semakin besar pula informasi yang didapat (Patton, 2006).

Berdasarkan tabel unit analisa dan penjelasannya di atas yang sesuai dengan penelitian ini, penulis membagi dua kriteria masyarakat yaitu masyarakat

formal dan non-formal. Masyarakat formal ialah masyarakat yang memimpin atau menjadi panutan masyarakat seperti kepala adat, kepala RT/RW dan sebagainya dan disebut dengan tokoh masyarakat. Sedangkan masyarakat non-formal ialah masyarakat umum yang tidak tergolong dalam tokoh masyarakat. Hal tersebut dipilih karena sudah dapat menggambarkan suatu kelompok, yaitu Etnis Mendawai. Dari pembagian tersebut, penulis menentukan delapan (8) orang informan kunci yang terdiri dari tiga (3) orang tokoh masyarakat dan lima (5) orang masyarakat Mendawai.

I.1.4 Jenis Data Penelitian

Berdasarkan definisi, tujuan, unsur dan karakteristik penelitian kualitatif dengan model fenomenologi menurut para ahli yang telah penulis jelaskan sebelumnya, disimpulkan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif dengan model fenomenologi ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya merupakan data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dari cara pengumpulannya, secara garis besar data penelitian dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, antara lain sebagai berikut:

I.1.4.1 Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah semua informasi mengenai pandangan politik etnis, diperoleh peneliti secara langsung dari Masyarakat Mendawai yang dijadikan obyek penelitian, serta pihak-pihak terkait yang dianggap penting dan dapat digali informasinya sebagai data utama dalam penelitian ini. Adapun data primer dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Data Primer Penelitian

No.	Nama Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1.	Gambaran Etnis Mendawai	Seluruh Informan Kunci.	Wawancara Mendalam dan Pengamatan
2.	Persepsi / Arti Politik	Seluruh Informan Kunci.	Wawancara Mendalam dan Pengamatan
3.	Partisipasi Politik	Seluruh Informan Kunci.	Wawancara Mendalam, Pengamatan dan Dokumentasi
4.	Pengetahuan Politik	Seluruh Informan Kunci.	Wawancara Mendalam dan Pengamatan
5.	Pendidikan Politik	Seluruh Informan Kunci.	Wawancara Mendalam, Pengamatan dan Dokumentasi
6.	Manfaat Politik	Seluruh Informan Kunci.	Wawancara Mendalam dan Pengamatan

I.1.4.2 Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah semua informasi mengenai persepsi politik etnis yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, yaitu melalui dokumen-dokumen yang mencatat keadaan konsep penelitian (ataupun yang terkait dengannya) didalam unit analisa yang dijadikan obyek penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3
Data Sekunder Penelitian

No.	Nama Data	Sumber Data
1	Partisipasi politik	Seluruh Informan Kunci.
2	Pendidikan politik	Seluruh Informan Kunci.

I.1.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Koentjaraningrat (dalam Bungin, 2003: 177-178), teknik pengumpulan data digolongkan menjadi 9 (sembilan) yakni pengamatan, *participant observer methods*, wawancara merdeka (bebas), wawancara terpimpin, *questionnaire*, *text recording*, *life history approach*, test-test psikologi dan *statistical methods*. Wawancara (interview), pengamatan (observasi) dan dokumentasi adalah teknik pengumpulan data pada pendekatan kualitatif (Buchari, 2014: 70) dan merupakan satu kesatuan teknik untuk mendapatkan data dan atau pemahaman yang mendalam mengenai persepsi politik Etnis Mendawai di Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah. Dari beberapa teknik pengumpulan data yang diterangkan di atas, peneliti memilih tiga teknis yang dianggap sesuai dengan penelitian ini. Tiga teknik tersebut dijelaskan sebagai berikut:

I.1.5.1 Wawancara Mendalam (*Indept Interview*)

Data penelitian berasal dari berbagai macam sumber seperti wawancara dan pengamatan (Strauss dan Corbin, 2003: 7), maka wawancara menjadi perangkat penting dalam mengumpulkan data. Wawancara ialah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai konsep penelitian (atau yang terkait dengannya) terhadap individu

manusia yang menjadi unit analisa penelitian. Wawancara merupakan percakapan antara dua orang yang salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk suatu tujuan tertentu (Gorden dalam Herdiansyah, 2010: 118).

Menurut Stewart dan Cash (dalam Herdiansyah, 2010: 118), wawancara ialah sebuah interaksi yang didalamnya terdapat pertukaran atau berbagi aturan, tanggungjawab, perasaan, kepercayaan, motif dan informasi. Dalam wawancara terdapat tiga metode wawancara (Herdiansyah, 2010: 121-125), yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi-terstruktur dan wawancara tidak-terstruktur. Penelitian ini menggunakan metode wawancara tidak-terstruktur untuk mendapatkan data secara langsung kepada obyek penelitian terkait pandangan politik Etnis Mendawai. Metode wawancara tidak-terstruktur memiliki ciri-ciri sebagai berikut (Herdiansyah, 2014: 124-125):

- 1) Pertanyaan sangat terbuka, jawabannya lebih luas dan bervariasi.
- 2) Kecepatan wawancara sulit diprediksi.
- 3) Sangat fleksibel (dalam hal pertanyaan atau jawaban).
- 4) Pedoman wawancara sangat longgar urutan pertanyaan, penggunaan kata, alur pembicaraan.
- 5) Tujuan wawancara adalah untuk memahami suatu fenomena.

Berikut ini adalah daftar informan kunci yang dijadikan obyek penelitian, yaitu:

Tabel 1.4
Daftar Informan Kunci Penelitian

No.	Nama Informan Kunci	Masyarakat / Instansi	Ket.
1	Zainal Abidin	Tokoh Masyarakat	
2	Kaspul Anwar	Tokoh Masyarakat	
3	Agus Irwandi	Tokoh Masyarakat	
4	M. Ruslan	Masyarakat	
5	Sumardiah	Masyarakat	
6	Srita Dewi	Masyarakat	
7	Kaspul Anwar	Masyarakat	
8	M. Robbyan Akbar	Masyarakat	

I.1.5.2 Pengamatan (Observasi)

Observasi berasal dari bahasa latin yang berarti memperhatikan dan mengikuti, dalam arti mengamati dengan teliti dan sistematis sasaran perilaku yang dituju (Banister dalam Herdiansyah, 2010: 131). Menurut Cartwright (dalam Herdiansyah, 2010: 131), observasi ialah suatu proses melihat, mengamati dan mencermati serta “merekam” perilaku secara sistemis untuk suatu tujuan tertentu. Dan menurut Herdiansyah (2010: 131), observasi ialah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan dan diagnosis. Intinya adalah adanya perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang ingin dicapai.

Ada beberapa alasan mengapa teknik pengamatan (observasi) digunakan (Guba dan Lincoln dalam Moleong, 1997: 125-126), antara lain sebagai berikut:

- 1) Didasarkan atas pengalaman secara langsung.

- 2) Memungkinkan melihat dan mengamati sendiri yang kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya.
- 3) Memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proposisional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data.
- 4) Membantu meyakinkan peneliti untuk mendapatkan data yang tidak bias.
- 5) Peneliti mampu memahami situasi-situasi yang rumit.
- 6) Membantu kasus-kasus penelitian tertentu di mana teknik komunikasi lainnya tidak dimungkinkan untuk digunakan.

Dalam observasi terdapat beberapa metode, yaitu (Herdiansyah, 2014: 133-143):

- 1) *Anecdotal Record*, peneliti hanya membawa kertas kosong untuk mencatat perilaku yang khas, unik dan penting yang dilakukan subjek penelitian.
- 2) *Behavior Checklist*, memberi keterangan mengenai muncul atau tidaknya perilaku yang diobservasi dengan memberikan tanda cek (√) jika perilaku yang diobservasi muncul.

- 3) *Participation Charts*, hampir sama dengan *Behavior Checklis* namun metode ini untuk melihat seberapa banyak atau seringnya terlibat (keaktifan) dari setiap subjek yang diobservasi dalam waktu yang sama.
- 4) *Rating Scale*, juga hampir sama dengan dua metode sebelumnya, perbedaannya terletak pada kebutuhan untuk mengetahui kuantitas dan kualitas dari perilaku yang diteliti.
- 5) *Behavioral Tallying and Charting*, metode yang tidak hanya mampu melakukan kuantifikasi atau perhitungan dari perilaku yang diobservasi tetapi juga mampu mengubah hasil kuantifikasi tersebut menjadi bentuk grafik.

I.1.5.3 Dokumentasi

Moleong (dalam Herdiansyah, 2010: 143-146) mengemukakan dua bentuk dokumen yang dapat dijadikan bahan dalam studi dokumentasi, antara lain:

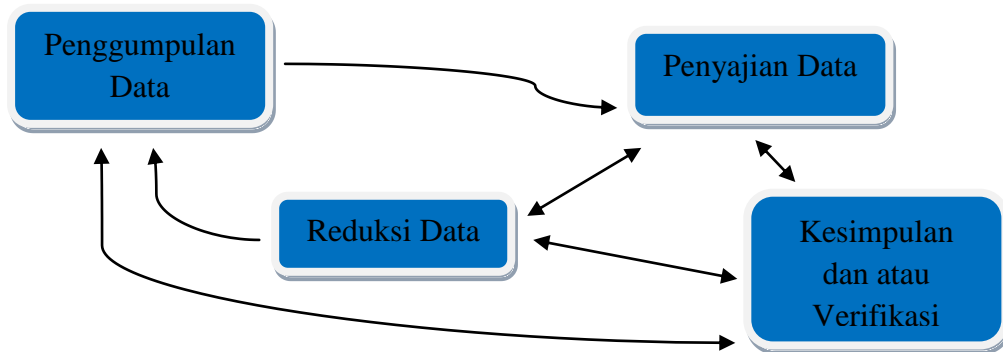
- 1) Dokumen Pribadi, catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman dan kepercayaan. Terdapat tiga dokumen pribadi yang umum digunakan peneliti kualitatif untuk dianalisis, yaitu catatan harian (diary), surat pribadi dan autobiografi.
- 2) Dokumen Resmi, mencakup dokumen internal (memo, pengumuman, instruksi, aturan suatu lembaga, sistem yang diberlakukan, hasil notulensi rapat keputusan pimpinan dan lain sebagainya) dan dokumen eksternal (majalah, koran, buletin, surat pernyataan dan lain sebagainya).

I.1.6 Teknis Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Moleong, 1997: 103). Inti dari analisis data adalah mengurai dan mengolah data mentah menjadi data yang dapat ditafsirkan dan dipahami secara lebih spesifik dan diakui dalam suatu perspektif ilmiah yang sama, sehingga hasil dari analisis data yang baik adalah data olah yang tepat dan dimaknai sama atau relatif sama dan tidak bias atau menimbulkan perspektif yang berbeda-beda (Herdiansyah, 2010: 158). Creswell (dalam Herdiansyah, 2010: 161-163) mengemukakan poin-poin penting yang perlu diperhatikan dalam melakukan analisis data kualitatif, antara lain:

- 1) Analisis data kualitatif dapat dilakukan secara simultan dengan proses pengumpulan data, interpretasi data dan penulisan naratif lainnya.
- 2) Proses analisis data kualitatif dilakukan berdasarkan pada proses reduksi data dan interpretasi.
- 3) Ubah data hasil reduksi ke dalam bentuk matriks.
- 4) Identifikasi prosedur pengodean digunakan dalam mereduksi informasi ke dalam tema-tema atau kategori-kategori yang ada.
- 5) Hasil analisis data yang telah melewati prosedur reduksi yang telah diubah menjadi bentuk matriks yang telah diberi kode, selanjutnya disesuaikan dengan model kualitatif yang dipilih.

Gambar 1.1
Komponen-komponen Analisis data Model Interaktif



Sumber: Diadopsi dari Miles dan Huberman (dalam Buchari, 2014: 73-74).

Komponen-komponen analisis data model interaktif di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan Data, dilakukan peneliti sebelum penelitian, pada saat penelitian dan bahkan di akhir penelitian (tidak bersegmen).
- 2) Reduksi Data, inti dari proses ini adalah penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan yang akan dianalisis.
- 3) Penyajian Data, mengolah data setengah jadi yang sudah seragam dalam bentuk tulisan dan sudah memiliki alur tema yang jelas.
- 4) Kesimpulan atau Verifikasi, merupakan tahap akhir dalam rangkaian analisis kualitatif model interaktif, menjurus kepada jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan sebelumnya dan mengungkap “*what*” dan “*how*” dari temuan sebuah penelitian.